

BAB I

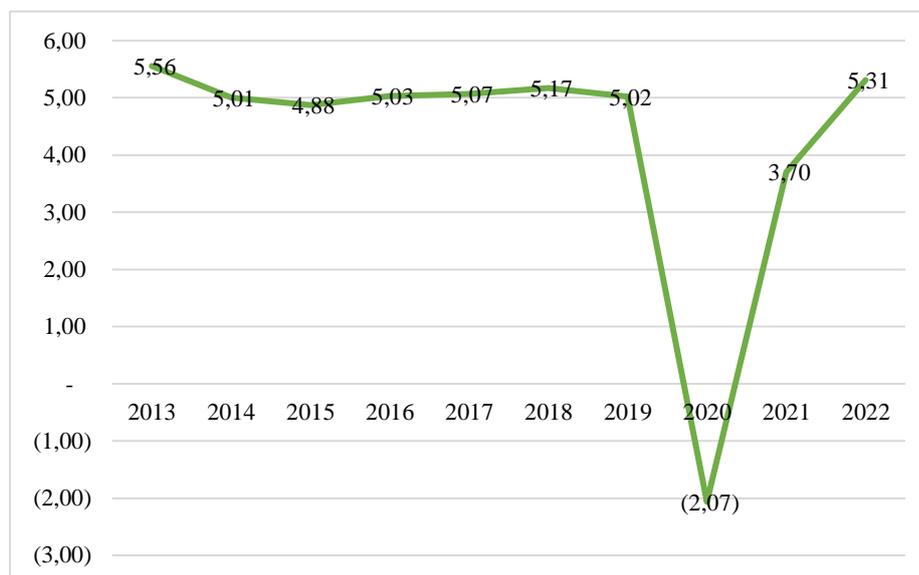
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan pada perekonomian suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa oleh masyarakat yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan pemerataan dan kestabilan, meningkatnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dapat disebabkan oleh faktor-faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah maupun kualitasnya (Sukirno, 2004: 9). Setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang positif untuk keberlangsungan pembangunan ekonominya termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui peningkatan hasil produksi dan pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai produk domestik bruto atau jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Konsep pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan keadaan perekonomian secara fisik suatu negara seperti penambahan jumlah dan produk barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah fasilitas dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, tenaga kerja, dan teknologi

(Simanungkalit, 2020b). Sebagaimana pula dijelaskan dalam teori pertumbuhan endogen, bahwa pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh faktor-faktor produksi. Dalam jangka panjang, modal manusia dan teknologi dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi. Variabel seperti inflasi dapat mengurangi akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menganalisis pada kepercayaan mekanisme pasar bebas dalam penciptaan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga mendorong pembangunan ekonomi. Menurut (Arsyad, 2010: 11), pembangunan ekonomi merupakan kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan PDB nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi makro. Salah satu contoh fenomena makro ekonomi yang pernah terjadi adalah inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB), dan fenomena pengangguran. Hal ini didasari oleh tiga alasan (Hidayat dkk., 2011). Pertama, penduduk yang selalu bertambah. Kedua, perekonomian harus memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan selama tidak terbatas. Dan ketiga, usaha menciptakan pemerataan (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

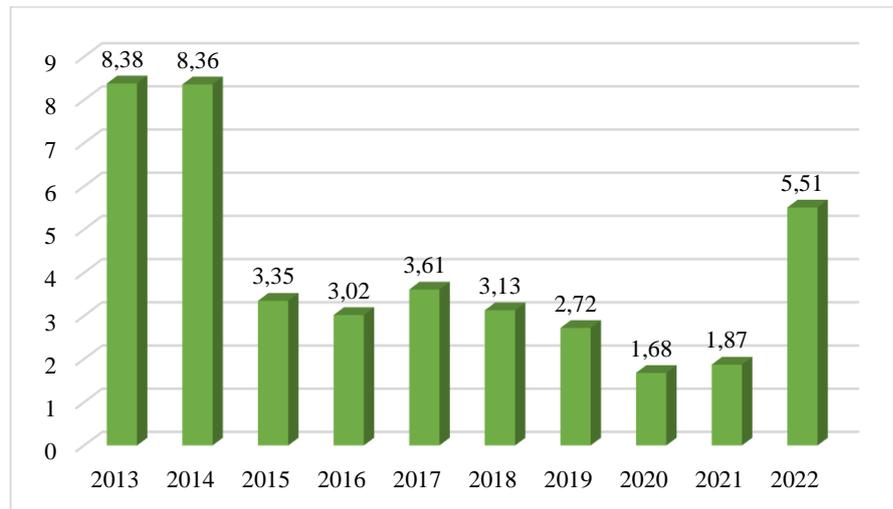
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa selama sepuluh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di taraf normal. Tahun 2013 perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5,56 persen hal ini disebabkan karena membaiknya perekonomian beberapa negara terutama Amerika Serikat dan China sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia ikut membaik. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen, 2015 sebesar 4,88 persen, 2016 sebesar 5,03 persen, dan 2017 sebesar 5,07 persen. Berdasarkan data diatas pada tahun 2018 badan pusat statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2018 merupakan pencapaian yang baik di Tengah ekonomi global yaitu mencapai 5,17 persen, yang berarti lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yakni sebesar 5,07 persen, bahkan tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2019 ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, yang artinya lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Dimana pada tahun tersebut pandemi *Covid-19* turut memukul perekonomian

hampir di seluruh dunia. Sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Selain itu, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 5,04 persen menjadi -2,63 persen, begitupun konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen yang disebabkan oleh efek pandemi *Covid-19*. Karena kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran APBN 2020 dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan keseimbangan anggaran dalam menghadapi *Covid-19*. Ini tentunya menyebabkan terjadinya perubahan postur APBN (APBN-P). Sehingga, kondisi di tahun 2020-2022 dapat dikatakan sebagai kondisi anomali fiskal, karena APBN dalam periode tersebut merupakan manifestasi strategi fiskal yang dirancang untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh positif mencapai 3,70 persen, angka tersebut mengindikasikan lebih baik daripada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Kemudian pada tahun 2022 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu 3,70 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi moneter yang dialami oleh semua negara termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa harga barang dan jasa suatu negara ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Inflasi terjadi ketika permintaan melebihi

pasokan artinya harga barang dan jasa mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Teori ini juga menekankan pada pentingnya produksi dan distribusi barang dan jasa sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilla dan Purnamasari (2021), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dkk (2021), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya ketika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Inflasi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya oleh kenaikan jumlah uang beredar, kenaikan harga produksi barang dan jasa, ataupun karena permintaan konsumen yang melebihi kapasitas produksi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998, inflasi yang sangat tinggi menyebabkan krisis ekonomi sekaligus melumpuhkan perekonomian Indonesia. Sehubungan dengan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa ekonom memiliki pandangan yang berbeda. Menurut pandangan Keynes (Dewi dkk, 2021), inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, karena kenaikan harga-harga yang diakibatkan akan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran. Namun, beberapa ekonom yang menganut pandangan neo klasik (Simanungkalit, 2020), berpendapat bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif, karena inflasi yang tinggi dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat.

Inflasi yang rendah dibarengi dengan suku bunga yang rendah, dapat mendorong dunia usaha berinvestasi dalam meningkatkan produksi yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para investor sehingga dapat mengurangi insentif untuk investasi dan konsumsi masyarakat yang rendah. Inflasi juga berdampak pada lalu lintas pasar keuangan karena berpengaruh langsung terhadap agregat moneter. Selain itu, inflasi yang tinggi menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menurun, begitupun sebaliknya. Inflasi berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan kebijakan makro seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan keseimbangan neraca pembayaran (Pohan, 2013: 14). Secara garis besar, inflasi pada negara-negara berkembang terjadi akibat kebijakan mengurangi tingkat pengangguran dan penciptaan *effective demand* dalam perekonomian. Karena *output* perekonomian negara-negara berkembang tersebut tidak mampu merespon kenaikan *employment rate* dan *effective demand*, maka terjadi inflasi. Jadi dapat dikatakan bahwa inflasi di negara berkembang lebih merupakan fenomena *aggregate supply* (Basu, 2000: 66-72).



Gambar 1.2 Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2022 (Persen)

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir terus berfluktuatif. Tingkat inflasi pada tahun 2013 hingga 2014 merupakan tertinggi setelah krisis 2008 yang mencapai 11,06 persen. Sepanjang tahun 2015 hingga 2021, inflasi berada di kondisi normal, mengalami naik turun namun tidak terlalu signifikan dengan tingkat tertinggi yaitu 3,61 persen pada tahun 2017 dan 1,68 persen pada tahun 2020. Penyebab inflasi mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni disebabkan oleh kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah dengan cara penyesuaian tarif listrik yang menyebabkan harga mengalami peningkatan di tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2020 inflasi yang rendah dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*, pasokan yang memadai, dan kebijakan dari Bank Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2013 hingga 2014 merupakan inflasi tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Inflasi yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2014 merupakan inflasi yang diakumulasikan oleh inflasi-inflasi sebelumnya akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pada saat itu, terjadi defisit anggaran

pemerintah hampir melampaui batas minimum 3 persen dari PDB di tengah tingginya harga minyak dunia dan subsidi BBM, sehingga pada tahun 2013 pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena banyak masyarakat yang protes akibat kenaikan harga BBM maka pemerintah kembali melanjutkan program pemberian uang tunai langsung, namun yang terjadi adalah inflasi menjadi naik selama tahun tersebut dan berlangsung hingga akhir tahun 2014. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2022, tingkat inflasi mencapai 5,51 persen yang kembali disebabkan oleh kenaikan harga BBM, namun pada tahun tersebut inflasi masih dalam kondisi terkendali. Selain kenaikan harga BBM, penyumbang terbesar penyebab terjadinya inflasi di Indonesia diantaranya kelompok bahan makanan, harga bawang merah dan tarif listrik.

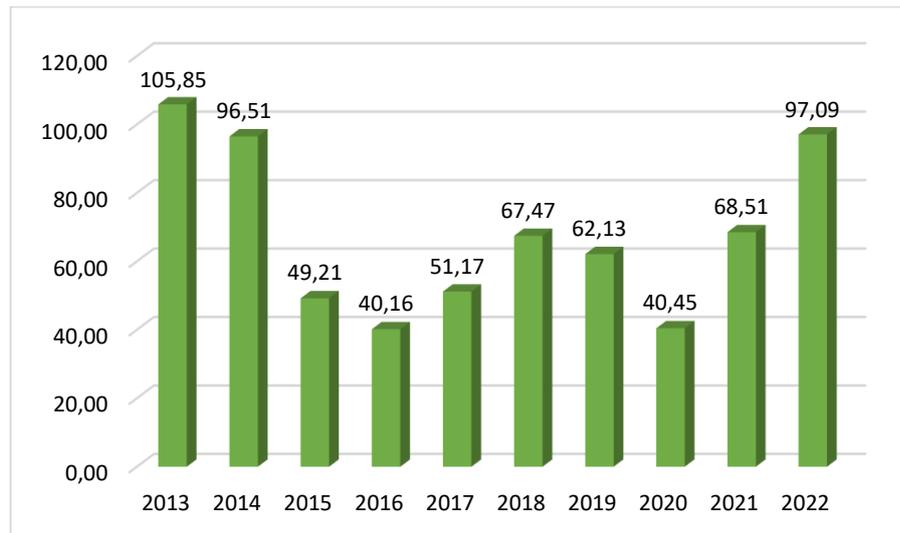
Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inflasi secara signifikan diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain dan jumlah uang beredar yang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat selama periode waktu tertentu. Fluktuasi harga BBM sering kali terjadi dan tentunya hal ini berdampak pada perekonomian negara Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, fluktuasi harga BBM terjadi dari tahun 2014 hingga tahun 2022 yang mana pada tahun tersebut harga BBM mencapai harga tertinggi selama periode. Kenaikan harga BBM ini disebabkan karena subsidi yang membengkak yang ditanggung oleh APBN. Selain itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan menaikkan harga BBM agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah menjadi lebih tepat sasaran seperti dengan penyaluran bantuan langsung

tunai (BLT), bantuan subsidi gaji/upah (BSU), dan bantuan untuk angkutan umum, ojek online, serta nelayan. Tidak hanya saat era pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebelum itu pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono fluktuasi harga BBM terjadi hingga tujuh kali selama sepuluh tahun, empat kali menaikkan harga BBM dan tiga kali menurunkan harga BBM dengan kenaikan mencapai 370 persen atau 185 persen per periode. Karena pada saat itu, harga minyak dunia melonjak 54 persen tepatnya pada bulan Oktober 2014. Kebijakan BLT juga dikeluarkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada 2005 untuk meredam gejolak kenaikan harga BBM. Selanjutnya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi kenaikan harga premium sebanyak empat kali, karena harga minyak dunia yang meroket 108,3 persen pada Oktober 2004. Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, harga BBM naik dua kali, pada saat itu harga minyak dunia hanya naik 9,1 persen. Sedangkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto, harga BBM naik sebanyak 32 kali, hanya Presiden Soekarno dan BJ Habibie yang tidak menaikkan harga BBM.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi inflasi adalah harga bahan bakar minyak atau yang dikenal dengan sebutan harga BBM. Harga BBM merupakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mensubsidi dan mengatur penjualan bahan bakar seperti bensin, solar dan lain-lain. Naik turunnya harga BBM sangat berpengaruh terhadap aktivitas produksi, karena BBM merupakan salah satu energi utama yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam memproduksi barang dan jasa. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kenaikan harga BBM dapat menyebabkan inflasi karena turut mempengaruhi sektor-sektor terkait seperti

transportasi dan manufaktur yang menyebabkan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga harga barang dan jasa ikut naik. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarbaini dan Nazaruddin (2023), bahwa kenaikan harga BBM berpengaruh positif terhadap inflasi. Artinya ketika harga BBM naik maka inflasi juga meningkat. Berdasarkan kondisi inflasi pada tahun 2013 yang menyebabkan defisit pada anggaran belanja pemerintah, biasanya pemerintah mencetak uang untuk menutup defisit tersebut sehingga jumlah uang beredar meningkat. Akibatnya, semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat maka nilai tukar (daya beli) menjadi lemah dan harga-harga barang dan jasa akan naik.

Harga bahan bakar minyak (BBM) selalu bergantung pada kondisi harga minyak mentah internasional atau *Indonesian Crude Oil Price (ICP)*. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, maka harga BBM akan ikut naik, begitupun sebaliknya. Karena harga minyak dunia merupakan komponen terbesar dalam pembentukan harga BBM. Naiknya harga minyak dunia di atas 90 US\$ per barel dinilai akan berdampak pada kenaikan harga BBM. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga BBM antara lain OPEC, situasi negara-negara produsen minyak, perkembangan teknologi dan inovasi, dan permintaan minyak global dari negara importir, nilai tukar, dan biaya distribusi.



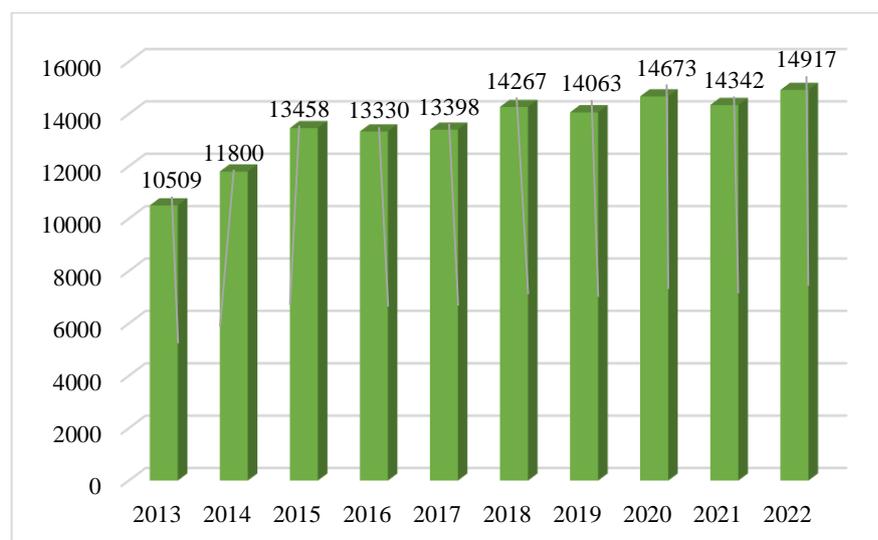
Gambar 1.3 Perkembangan Indonesian Crude Oil Price (ICP) Tahun 2013-2022 (Barrel per Liter)

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (data diolah)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, perkembangan ICP selama sepuluh tahun terakhir terus berfluktuatif. Dari tahun 2015 hingga 2021 ICP masih dibawah 90 US\$ per barel yang artinya tidak terlalu berdampak signifikan terhadap harga BBM di Indonesia. Berbeda dengan tahun 2013 hingga 2014 ICP mengalami kenaikan walaupun tidak bertahan lama. Sehingga pada akhir tahun 2013 ICP turun dari 105,85 US\$ per barel menjadi 96,51 US\$ per barel pada tahun 2014. Sejak pertengahan 2014 ICP turun anjlok hingga 55 persen dan bergerak cukup stabil hingga tahun-tahun berikutnya. Kondisi harga minyak yang turun drastis disebabkan oleh produksi minyak mentah di Amerika Serikat dan penurunan permintaan minyak dari negara-negara. Kemudian pada tahun 2022, ICP kembali naik dengan harga rata-rata 97,09 US\$ per barel yang menyebabkan dampak signifikan terhadap kondisi bahan bakar minyak sehingga harga BBM kembali naik.

Faktor yang kedua adalah nilai tukar, yang merupakan nilai satuan rupiah terhadap mata uang negara lain. Kondisi nilai tukar yang sering berubah-ubah dapat

menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian khususnya dalam perdagangan internasional. Bank Indonesia memiliki tugas dalam memelihara stabilitas keuangan salah satunya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsep stabilitas nilai rupiah disini mencakup kestabilan harga barang dan jasa yang diukur dari inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil (Bank Indonesia, 2020). Artinya, ketika nilai tukar menguat maka inflasi dapat dikendalikan atau stabil, tetapi jika nilai tukar melemah maka inflasi bisa dikatakan berada dalam kondisi tidak stabil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiarsih dan Romanda (2020), yang menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap inflasi. Artinya ketika nilai tukar menguat maka inflasi akan menurun.



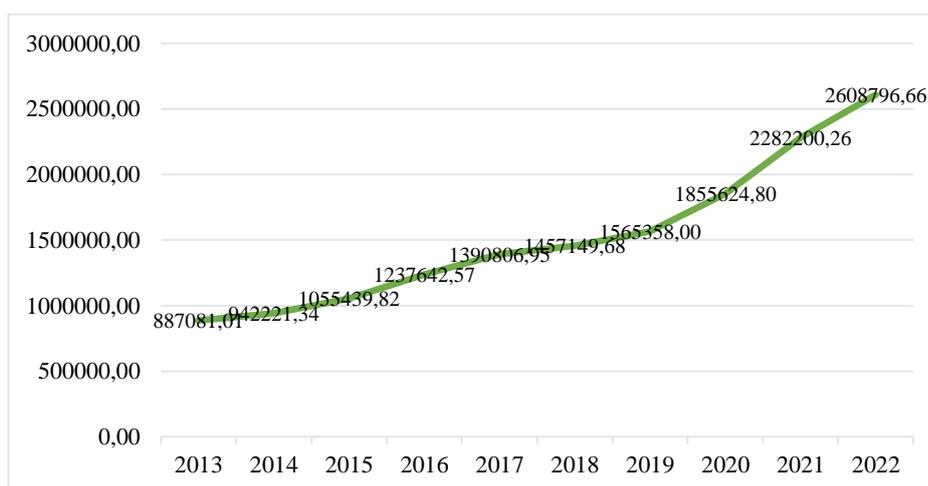
Gambar 1.4 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Tahun 2013-2022 (Rupiah)

Sumber: Kementerian Perdagangan (data diolah)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata nilai tukar rupiah selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi perekonomian global dan domestik, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Nilai tukar rupiah dari tahun 2013 hingga tahun 2022 mengalami depresi yang tinggi melebihi Rp10.000. Pada tahun 2013 rata-rata nilai tukar rupiah adalah 10.509 kemudian mengalami depresi hingga tahun 2015 menjadi Rp13.458. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh menjadi Rp13.330, dan pada tahun 2017 naik kembali menjadi Rp13.398, tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 mengalami depresi yang cukup tinggi yaitu Rp14.267, kemudian turun sedikit pada tahun 2019 menjadi Rp14.063. Hal serupa terjadi pada tahun 2020, depresi yang dialami yaitu sebesar Rp14.673 kemudian turun sedikit pada tahun 2021 menjadi Rp14.342, namun mengalami depresi kembali pada tahun 2022, dan bisa dikatakan depresi tertinggi sepanjang sepuluh tahun terakhir. Dari data fluktuasi nilai tukar rupiah tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah selama sepuluh tahun terakhir terus mengalami depresi hingga nilai tukar rupiah terhadap US dolar amerika serikat menjadi Rp14.917.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi inflasi adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar merupakan semua jenis uang yang beredar di masyarakat meliputi uang kartal maupun uang giral. Jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk melakukan transaksi tergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Semakin tinggi tingkat harga barang dan jasa, maka semakin besar jumlah uang yang diinginkan masyarakat. Menurut teori kuantitas uang, jumlah uang

beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara itu peningkatan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Soebagiyo (2022), yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi. Artinya ketika jumlah uang beredar semakin banyak maka inflasi meningkat.



Gambar 1.5 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M₁) di Indonesia Tahun 2013-2022 (Milyar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah uang beredar di masyarakat selama sepuluh tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2013 jumlah uang beredar di Indonesia untuk jenis uang kartal dan giral (M₁) yaitu sebesar Rp887081,01 milyar hingga mencapai tingkat tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp2608796,66 milyar. Meningkatnya jumlah uang beredar di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi, suku bunga, produk domestik bruto (PDB), ekspansi keuangan pemerintah, penyaluran kredit, aktivitas luar negeri bersih, maupun kebijakan Bank Indonesia. Sesuai teori dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harga BBM, nilai tukar, dan jumlah uang beredar

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi. Sehingga dari data yang sudah dijelaskan mampu menggambarkan bagaimana variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan harga BBM dan harga minyak dunia selalu mempengaruhi inflasi dan memiliki pola fluktuasi yang hampir sama. Jumlah uang beredar yang terus meningkat juga turut mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan nilai tukar yang cenderung mengalami depresiasi dari tahun ke tahun. Melemahnya mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, yaitu US Dollar, maka menandakan bahwa perekonomian negara tersebut sedang bermasalah.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu serta uraian fenomena dan permasalahan diatas bahwa terdapat perbedaan hasil dan ketidaksesuaian antara pandangan teori pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menggambarkan bahwa harga BBM, nilai tukar, dan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi inflasi, yang kemudian inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi di Indonesia, karena posisi Indonesia saat ini merupakan negara importir minyak dunia, dan fluktuasi harga yang terus-menerus terjadi selama beberapa periode mampu mempengaruhi produktivitas pada sektor-sektor terkait sehingga dapat mempengaruhi inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu menggunakan data sekunder dengan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu observasi, penggunaan variabel harga BBM dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Indonesia melalui inflasi di Indonesia, serta metode analisis yang digunakan yang berbeda untuk melihat pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi di Indonesia dengan menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS), yang berjudul **“Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak, Nilai Tukar, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi Indonesia Tahun 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022?
4. Bagaimana pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka dikemukakan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, manfaat yang diharapkan yaitu:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Bagi Mahasiswa

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan peneliti terkait masalah yang diteliti yaitu pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap inflasi serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013-2022.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu tambahan informasi untuk para mahasiswa dan pihak terkait lainnya di Universitas Siliwangi khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh harga bahan bakar minyak (BBM), nilai tukar, dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inflasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan koreksi bagi pemerintah dalam menangani inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait penetapan harga bahan bakar minyak (BBM), dan dapat membantu dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam mengendalikan perekonomian nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang positif.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Dengan mengakses situs resmi Bank Indonesia melalui www.bi.go.id, Badan Pusat Statistik melalui www.bps.go.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui migas.esdm.go.id, dan Kementerian Perdagangan melalui www.kemendag.go.id.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024, dimulai sejak bulan September 2023 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan. Peneliti memperkirakan matriks jadwal penelitian sebagai berikut:

